

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional. Dokumen RPJMD DIY Tahun 2013-2017 merupakan penjabaran Visi dan Misi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang secara resmi disampaikan usai dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2017 didepan Rapat Paripurna DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 10 Oktober 2012.

RPJMD Tahun 2013-2017 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan daerah; yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan semangat keistimewaan di dalamnya dan digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).

RKPD mempunyai peran sebagai pedoman dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara dan selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh

mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Jumlah penduduk DIY menurut hasil Sensus Penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1971 sebanyak 2.489.360 orang kemudian meningkat menjadi 3.457.491 orang pada tahun 2010. Menurut wilayah, hampir seluruh kabupaten/kota di DIY mengalami pertumbuhan penduduk yang positif. Laju pertumbuhan penduduk terendah berada di Kabupaten Kulonprogo sebesar 0,34% dan tertinggi berada di Kabupaten Sleman, yaitu 1,30%. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sleman dan Bantul dimungkinkan karena pergeseran lokasi perguruan tinggi ke arah kedua kabupaten tersebut sehingga banyak pendatang baru yang datang untuk belajar di DIY yang kemudian tinggal di kedua kabupaten tersebut. Tingginya pertumbuhan di Kabupaten Sleman dan Bantul tersebut juga disebabkan Kota Yogyakarta semakin jenuh untuk dijadikan sebagai tempat pemukiman sehingga banyak penduduk yang memilih bermukim di daerah penyangga kota.

Data diatas merupakan salah satu penjelasan terjadinya fenomena aglomerasi perkotaan di Kota Yogyakarta. Pembangunan ekonomi yang berpusat di kota dibarengi dengan semakin tingginya jumlah penduduk, dan padatnya bangunan-bangunan untuk tempat tinggal maupun aktifitas ekonomi dan pendidikan memerlukan perhatian serius karena juga perlu diikuti dengan tersedianya sarana prasarana/layanan dasar yang diampu oleh sektor ke-ciptakarya-an (air bersih/air minum, air limbah, persampahan, drainase)

## BAB II

### KONDISI SEKTOR KECIPTA-KARYAAN DI DIY

#### 2.1 Kinerja Sektor Cipta Karya terhadap target MDG's

Millenium Development Goals (MDGs) atau tujuan pembangunan millennium merupakan delapan tujuan pembangunan di tingkat internasional yang ingin dicapai di seluruh dunia pada tahun 2015. Komitmen global tersebut telah ditetapkan dan ditandatangani oleh 189 negara pada pertemuan United Nations World Summits bulan September tahun 2000 di New York. Millennium Declaration tersebut kemudian disahkan oleh Majelis Umum PBB dalam Resolusi Nomor 55/2 tanggal 18 September 2000. Sektor Cipta Karya yang ruang lingkup pelayanannya meliputi: (1) Air Minum, (2) Air Limbah, (3) Persampahan, dan (4) Drainase memegang kunci utama bagi pencapaian tujuan MDG's ke-7 yakni : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Target	Indikator yang dimonitor	
<b>Target 7C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum yang layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015</b>	7.1	Proporsi rumah tangga dengan aksesberkelanjutan terhadap air minum layak
	7.2	Proporsi rumah tangga dengan aksesberkelanjutan terhadap sanitasi dasar yang layak

Kondisi di DIY terkait dengan pencapaian tujuan MDG's tersebut dapat terlihat pada tabel-tabel berikut :

**Tabel 2.1 Jumlah dan Persentase Rumah Tangga DIY Terlayani Sanitasi Layak, 2010-2012**

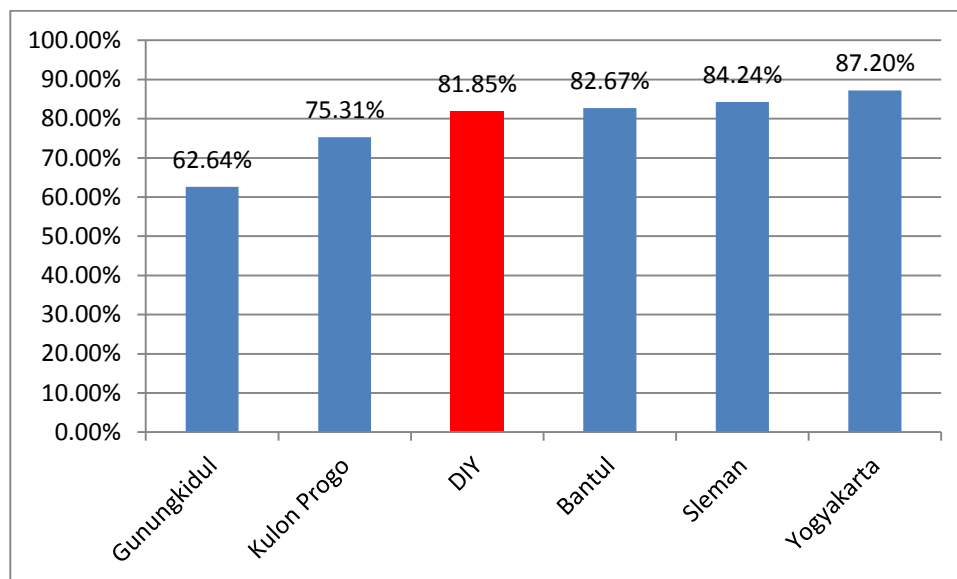
Tahun	Jumlah Rumah Tangga	Perkotaan			Perdesaan			Total Rumah Tangga Terlayani	
		Jumlah Rumah Tangga Perkotaan	Rumah Tangga Terlayani Perkotaan		Jumlah Rumah Tangga Perdesaan	Rumah Tangga Terlayani Perdesaan			
	(RT)	(RT)	(RT)	(%)	(RT)	(RT)	(%)	(RT)	(%)
2010	691.498	442.516	389.088	89,71	248.982	176.903	72,78	565.991	81,85
2011	693.440	443.759	394.190	90,61	249.681	182.303	74,74	576.493	83,14
2012	699.220	447.458	404.790	92,24	251.762	192.403	78,15	597.193	85,41

Sumber: Dinas PUP & ESDM DIY, 2011

Dari perhitungan Dinas PU-P dan ESDM pada tahun 2012 terdapat 85,41% rumah tangga yang mempunyai akses layak terhadap sanitasi, sedangkan target MDG's pada tahun 2015 adalah 90% masyarakat mempunyai akses yang layak terhadap sanitasi. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi capaian di DIY terkait dengan indikator ini masih dalam jalur yang sesuai.

Capaian pelayanan sanitasi layak di Provinsi DIY tergolong cukup baik di atas capaian pelayanan nasional 55,53% , demikian pula target MDGs 2015 sebesar 62,41% telah terlampaui. Namun demikian secara ideal semua rumah tangga di provinsi DIY harus memiliki prasarana dan sarana sanitasi yang layak baik di pedesaan maupun perkotaan, dengan target 2015 adalah 90%. Kendala pencapaian 7C Sanitasi diantaranya adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya prasarana dan sarana dasar sanitasi serta kemampuan masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana dasar sanitasi masih rendah. Sanitasi yang layak akan berdampak pada meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan termasuk mengurangi angka kematian bayi berkaitan dengan penyakit diare dan penyakit perut lainnya. Dengan demikian upaya-upaya peningkatan pelayanan sanitasi layak di DIY tetap perlu ditingkatkan. Sanitasi yang layak akan berdampak pada meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan termasuk mengurangi angka kematian bayi.

Peta pencapaian tujuan MDGs Sanitasi menurut Kabupaten/kota dijelaskan melalui diagram berikut ini.



Gambar. 2.1

Kondisi proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap Sanitasi layak per Kabupaten/Kota Provinsi DIY (Susenas, 2010)

Pembangunan air minum merupakan salah satu agenda nasional yang terkait juga dengan agenda global sebagaimana dicanangkan melalui Deklarasi Millenium Development Goals (MDGs). Saat ini secara nasional pencapaian sasaran MDGs tersebut masih belum sesuai dengan yang ditargetkan, namun demikian dari hasil laporan Bappenas pada tahun 2009, DIY merupakan provinsi dengan capaian terbaik untuk air minum dengan 60,38%.

Tabel diatas menunjukkan peningkatan pada tahun 2010 menjadi sebesar 64%. Pencapaian pada tahun 2012 (Dinas PU-P dan ESDM) menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dimana perhitungan persentase penduduk berakses air minum layak di DIY telah mencapai sebesar 70,38% atau melayani 2.460.539 jiwa dari total jumlah penduduk DIY yaitu sebesar 3.496.100 jiwa.

**Tabel. 2.2 Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di DIY, 2005-2010**

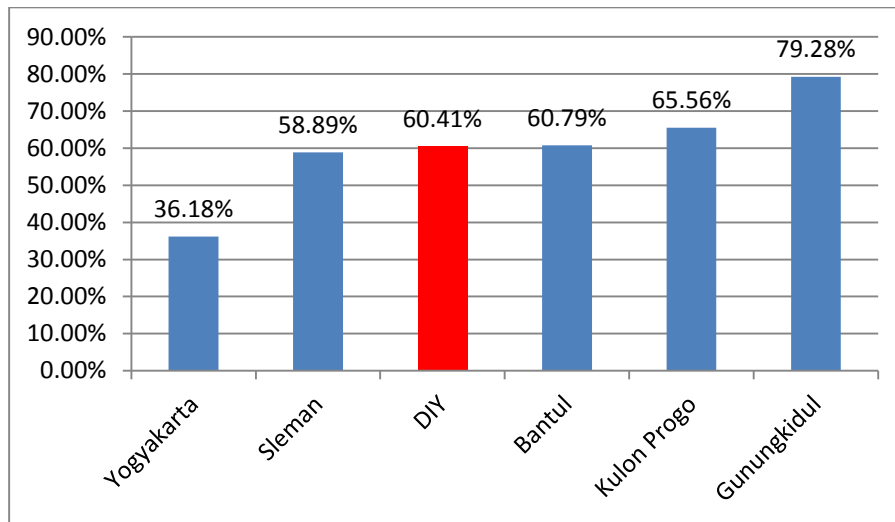
<b>Tahun</b>	<b>Rasio rumah tangga pengguna air bersih</b>	<b>Rumah tangga pengguna air bersih</b>	<b>Jumlah seluruh rumah tangga</b>
2005	0,44	296,164	673,100
2006	0,48	326,410	680,020
2007	0,52	357,188	686,900
2008	0,56	386,807	693,700
2009	0,60	420,424	700,706
2010	0,64	452,981	707,782

*Sumber: Dinas PUP & ESDMDIY, 2011*

Capaian pelayanan air minum layak tersebut tergolong cukup baik di atas capaian pelayanan nasional. Namun kenyataan empirik menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya air di wilayah DIY semakin hari semakin terbatas. Ketidakseimbangan antara jumlah air yang diproduksi dengan permintaan kebutuhan air masyarakat kini dan mendatang memerlukan upaya-upaya komprehensif dalam memperoleh sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk mencapai target MDGs DIY Tahun 2015 sebesar 80% memerlukan upaya percepatan melalui program dan kegiatan penyediaan infrastruktur air minum secara terpadu antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta peningkatan peran swasta dan masyarakat.

Peningkatan penduduk dan meningkatnya kegiatan masyarakat menyebabkan peningkatan kebutuhan air minum, sementara ketersediaan air minum baik di pedesaan dan perkotaan belum tercukupi saat ini. Pada satu sisi terjadi penurunan kapasitas penyediaan air minum dikarenakan menurunnya sumber-sumber air bersih dan layak untuk dikonsumsi. Kendala dalam pencapaian Tujuan 7C Air Minum diantaranya adalah terbatasnya debit mata air sumber air minum, kemudian kualitas air permukaan dan air tanah dangkal sebagai sumber air baku menurun akibat pencemaran lingkungan, terutama pada kawasan padat penduduk di perkotaan.

Peta pencapaian tujuan MDGs per Kabupaten/kota di Provinsi DIY dijelaskan melalui diagram sebagai berikut ini.



Gambar. 2.2

Kondisi proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak per Kabupaten/Kota Provinsi DIY (Susenas, 2010)

## 2.2 Kinerja Sektor Cipta Karya terhadap target RPJMD

RPJMD 2013-2017 merupakan kesinambungan yang tidak terpisahkan dari RPJMD 2009-2013, dimana tahun terakhir RPJMD 2009-2013 akan menjadi tahun awal RPJMD 2013-2017. Evaluasi terhadap kinerja RPJMD sebelumnya merupakan langkah awal untuk menyusun strategi dan kebijakan dalam pencapaian target RPJMD 2012-2017. Capaian pembangunan sektor cipta karya terhadap indikator target RPJMD 2009-2013 dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Capaian Pembangunan Keciptakarya Terhadap RPJMD 2009-2013

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2011	2012		
				Target	Realisasi	% Realisasi
1	Penambahan penyediaan air baku bagi masyarakat	Lt/det	100,00	100,00	306,00	306%
2	Prosentase penduduk berakses air minum	Persen	60,00	70,00	70,38	100,54%
3	Prosentase layanan jaringan air limbah terpusat di APY	Persen	30,00	40,00	61,00	153%
4	Prosentase Penduduk yang terlayani pengelolaan sampah	Persen	65,00	70,00	71,40	102,00%

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2011	2012		
				Target	Realisasi	% Realisasi
5	Jumlah TPA sampah yang menggunakan <i>Sanitary Landfill</i>	Unit	2,00	2,00	2,00	100%
6	Prosentase Penurunan Genangan	Persen	10,00	10,00	8,43	84,30%
7	Jumlah kawasan yang dikembangkan	Jumlah	1,00	2,00	2,00	100%

Pada tahun 2012 capaian target penyediaan air baku bagi masyarakat yang sebesar 100 Lt/det telah dipenuhi 306 Lt/det melalui kegiatan pembangunan embung baru dan pemeliharaan embung yang sudah ada, peningkatan distribusi air baku, koordinasi kelembagaan sumber daya air, survey kondisi bangunan prasarana sungai, serta pemeliharaan pos dan peralatan hidrologi.

Jumlah penduduk berakses air minum sebagai hasil pelaksanaan pembangunan sistem penyediaan air minum oleh pemerintah pusat dan daerah serta swadaya masyarakat di DIY sampai tahun 2012 sebanyak 2.460.539 jiwa, terdiri dari ; jumlah penduduk yang mendapat layanan air minum perkotaan sebanyak 1.144.079 jiwa dan jumlah penduduk yang mendapat layanan air minum perdesaan sebanyak 1.316.460 jiwa. Target cakupan pelayanan persentase penduduk terlayani air minum dihitung berdasar persentase perbandingan antara jumlah penduduk yang terlayani air minum dibanding dengan keseluruhan penduduk DIY. Sehingga perhitungan persentase penduduk berakses air minum tahun 2012 adalah sebesar 2.460.539 jiwa dibagi dengan jumlah penduduk DIY sebesar 3.496.100 jiwa atau sebesar 70,38 %.

Penyediaan air bersih di DIY dibedakan atas sistem perpipaan dan non perpipaan. Sebagian besar penduduk DIY masih mengandalkan sumur (non-perpipaan) sebagai sumber penyediaan air bersih rumah tangga sehari-hari, sedangkan penyediaan air bersih dengan sistem perpipaan yang dikelola oleh PDAM melayani penduduk di daerah perkotaan. Tantangan berat untuk mencapai target penyediaan sektor air minum dapat terlihat dari analisa yang dilakukan terhadap kinerja PDAM selaku penyedia utama sistem perpipaan khususnya di daerah perkotaan DIY.

Kapasitas produksi PDAM di DIY meningkat dari tahun ke tahun, namun kenaikan ini tidak cukup signifikan untuk mengantisipasi kenaikan jumlah penduduk maupun kebutuhan ekspansi pelanggan. Lebih dari separuh sumber air bagi PDAM didapatkan dari air tanah

mempunyai konsekuensi yang cukup besar khususnya bagi konservasi air tanah dan aspek kualitas air minum yang dihasilkan. Berkurangnya kuantitas mata air diakibatkan oleh eksploitasi di wilayah hulu (Kabupaten Sleman), dan kemungkinan air tanah tercemar limbah rumah tangga yang ditandai dengan kandungan bakteri coli tinggi.

Tabel 2.4 Jumlah Perusahaan Air Minum, Status Perusahaan, Kapasitas Produksi, dan Sumber Air Baku di DIY

Rincian	2009	2010	2011
<b>Jumlah Perusahaan</b>	6	6	6
1. Pemerintah	5	5	5
2. Swasta	1	1	1
<b>Kapasitas Produksi (lt/detik)</b>			
1. Potensial	2.224	2.250	4.506
2. Efektif	1.577	1.811	1.957
<b>Sumber Air (m<sup>3</sup>)</b>	37.177	39.149	39.778
1. Sungai	5.437	6.413	7.123
2. Waduk	483	488	503
3. Mata Air	6.833	7.529	5.631
4. Air Tanah	24.424	24.719	26.521

Sumber : DIY dalam angka, 2012

Sementara itu kenaikan persentase penduduk berakses air minum melalui sistem perpipaan juga diperoleh dari program pengembangan dan optimalisasi SPAM IKK/Desa yang dilakukan oleh Pemerintah baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Kegiatan ini dilakukan dengan mengeksplorasi sumber-sumber air baku yang dapat digunakan untuk kebutuhan masyarakat dan selanjutnya dibawa melalui sistem perpipaan. Pada penguatan kelembagaan, telah dibentuk Paguyuban Air Minum Masyarakat Yogyakarta sebanyak 482 kelompok. Anggotanya merupakan kelompok-kelompok masyarakat pengelola air minum di perdesaan dan hingga akhir tahun 2012, tiap-tiap kelompok rata-rata mengelola sumber 1 s.d. 2 liter/detik.



Gambar berikut adalah hasil dokumentasi kegiatan penyediaan air minum di DIY yang didanai oleh APBN dan APBD DIY.



**Gambar 2.3**

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan melalui pendanaan APBN TA. 2012 di Kab. Kulon Progo melalui pendanaan APBN oleh Satker PKPAM Prov. DIY

Pelayanan air limbah domestik di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, secara umum dapat dibedakan menjadi tiga tipe pelayanan, yaitu :

1. Wilayah dengan pelayanan sistem on-site

Penduduk diharapkan dapat mengolah buangnya dengan kemampuannya sendiri, misalnya dengan menggunakan jamban keluarga, dan diutamakan untuk warga mampu dan berada pada daerah kepadatan rendah.

2. Wilayah dengan pelayanan sistem komunal

Diterapkan untuk penduduk yang berada pada wilayah padat dan secara teknis tidak bisa dilayani oleh sistem terpusat kota.

3. Wilayah dengan pelayanan sistem terpusat kota/ sistem off-site

Diterapkan untuk penduduk yang berada pada wilayah padat dan secara teknis bisa dilayani oleh sistem terpusat kota. Pengolahan limbah terpusat merupakan sistem pengolahan yang menggunakan jaringan perpipaan untuk mengalirkan air limbah dari masing masing rumah penduduk dan kemudian dialirkan ke IPAL. Pengolahan air limbah dengan sistem terpusat terdiri dari sambungan rumah tangga dan non

rumah tangga, jaringan pengumpul, sistem penggelontor, dan jaringan perpipaan yang mengalirkan limbah menuju IPAL Sewon Bantul.

Penggunaan pengolahan limbah sistem terpusat kota dilakukan di kawasan yang tergolong padat, dengan kepadatan penduduk lebih dari 100 jiwa/ha seperti Kota Yogyakarta, sebagian wilayah Kabupaten Sleman dan Bantul yang merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY). Sistem ini terdiri atas jaringan lateral dan sistem penggelontor yang dibangun pada tahun 1930, dan jaringan induk serta Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang dibangun tahun 1995 dan terletak di Dusun Cepit, Desa Pendowoharjo, Sewon, Bantul. Melalui kerjasama kawasan perkotaan KARTAMANTUL, mulai Januari 1996, saluran limbah Kota Yogyakarta telah terintegrasi dengan sistem pengolahan limbah terpusat skala perkotaan dengan Kabupaten Sleman dan Bantul.

Pada wilayah Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (APY) pelayanan diutamakan melalui sistem terpusat oleh IPAL Sewon. Cakupan pelayanan jaringan Air Limbah Terpusat di APY dihitung berdasar persentase perbandingan antara jumlah sambungan rumah terpasang dengan kapasitas IPAL Sewon. Cakupan pelayanan IPAL Sewon sampai dengan tahun 2012 adalah 13.319 SR dari kapasitas IPAL sebesar 25.000 SR. Belum optimalnya pengembangan sistem jaringan dan kesadaran masyarakat untuk menyambung menjadikan target limbah yang harus diolah di IPAL Sewon sampai saat ini belum bisa terpenuhi sesuai kapasitas yang diharapkan dan jumlah pelanggannya masih jauh di bawah kapasitas desain.

Data pada tahun 2012 menyebutkan bahwa IPAL Sewon dilengkapi dengan jaringan Pipa Induk dengan panjang 79,65 km dan jaringan panjang Pipa Lateral 138,51 km yang melintas di wilayah perkotaan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. Selain itu IPAL sewon juga dilengkapi dengan Sistem Penggelontor termasuk Bangunan Pipa Intake, Bak Pengendap dan Pipa Penggelontor dengan panjang sekitar 24,16 km.

Bagi masyarakat yang tinggal di daerah yang cukup padat namun belum terjangkau oleh pelayanan perpipaan air limbah, pengolahan limbah domestik dilakukan dengan cara pengolahan sistem komunal. Di Kota Yogyakarta saat ini jumlah septik-tank komunal adalah 45 unit, yang tersebar 3 kawasan sungai di Kota Yogyakarta, yaitu Sungai Winongo, Sungai Code, Sungai Gadjah Wong. Berdasarkan data tahun 2011, jumlah KK yang terlayani oleh septik tank komunal berjumlah 1.429 KK. Jumlah tersebut masih dibawah kapasitas terbangun septik tank, sehingga masih mencukupi untuk kebutuhan beberapa tahun berikutnya.

DI Yogyakarta telah memulai kegiatan sanitasi berbasis masyarakat atau sering disingkat SANIMAS sejak tahun 2000 an. SANIMAS adalah sebuah inisiatif untuk mempromosikan penyediaan sarana dan prasarana air limbah pemukiman yang berbasis

masyarakat dengan pendekatan tanggap kebutuhan. Fokus kegiatan SANIMAS adalah penanganan air limbah rumah tangga khususnya tinja manusia namun tidak menutup kemungkinan limbah cair rumah tangga yang berasal dari industri kecil yang dapat diuraikan secara biologis. Di Kabupaten Bantul, berdasarkan data tahun 2010 terdapat 6 lokasi pengelolaan sanimas berupa 4 unit IPAL Komunal di daerah Jetis dan Pleret serta MCK plus dan IPAL tahu. Sedangkan di Kabupaten Sleman pengelolaan sanimas saat ini meliputi 5 unit. Tiga unit tersebut berupa 3 IPAL komunal dan 2 MCK plus serta 1 IPAL tahu.

Sistem drainase induk yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah sistem drainase alam, yaitu suatu sistem yang menggunakan sungai dan anak sungai sebagai sistem primer penerima air buangan dari saluran – saluran sekunder dan tersier yang ada. Keseluruhan sistem tersebut berfungsi untuk menyalurkan air hujan dan limbah rumah tangga. Sebagian dari saluran drainase sekunder yang ada di DIY juga menggunakan saluran irigasi sebagai saluran pembuangannya.

Sarana Drainase untuk seluruh wilayah Kota Yogyakarta meliputi drainase utama berupa Sungai Gadjahwong, Sungai Winongo dan Sungai Code, saluran drainase sekunder (pembawa) tertutup, saluran drainase sekunder (pembawa) terbuka, saluran tersier (pengumpul) tertutup, saluran tertier (pengumpul) terbuka. Seluruh sirkulasi drainase disalurkan menuju ke saluran drainase utama berujud ketiga sungai diatas.

1. Sungai Code (39,00 km)

Sungai Code dengan hulu di daerah Kaliurang melintasi wilayah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul. Sungai Code bermuara di sungai Opak di daerah Jetis. Panjang alur sungai  $\pm$  39,00 km. Sungai Code merupakan system drainase utama yang paling penting untuk wilayah Kota Yogyakarta.

2. Sungai Gajahwong (21,00 km)

Sungai Gajahwong dengan panjang alur  $\pm$  21,00 km bermuara di sungai Opak di daerah Plered. Dengan area pelayanan Ngaglik dan Depok di Kabupaten Sleman, sebagian wilayah Kota Yogyakarta, dan Banguntapan serta Plered di Kabupaten bantul.

3. Sungai Winongo (43,75 km)

Sungai Winongo dengan panjang alur 43,75 km. Bagian hulu sungai Winongo ada di daerah Kaliurang atau sekitar Turi/Pakem. Daerah Aliran Sungai (DAS) sungai Winongo seluas  $\pm$  88,12 Km<sup>2</sup>. Sungai Winongo melintasi wilayah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul. Sungai Winongo bermuara di Sungai Opak pada daerah Kretek.

Wilayah Kabupaten Sleman sebagian besar dilayani oleh sistem pembuang utama Sungai Progo dan anak – anak sungainya. Sebagian wilayah Kabupaten Sleman di bagian timur dan tenggara (Ngaglik, Kalasan, Depok dan Berbah) yang dilayani oleh sistem

pembuang Sungai Opak. Terdapat 5 daerah aliran sungai (DAS) yang cukup besar, yakni dari barat ke timur DAS: Progo, Konteng, Bedog, Winongo-Code dan Opak Hulu. Semua sungai tersebut merupakan sungai perenial, yaitu suatu kondisi dimana curah hujannya yang tinggi, sementara sifat tanahnya permeabel dan akifernya tebal, maka aliran dasar (base flow) pada sungai-sungai tersebut cukup besar yang termasuk efluent. Selain itu di Kabupaten Sleman juga terdapat badan penerima air lain berupa embung yang pada saat ini masih dalam tahap pembangunan yaitu Embung Tambakboyo. Jika pembangunannya sudah selesai maka embung tersebut dapat berfungsi sebagai badan penerima air untuk wilayah Kabupaten Sleman.

Wilayah Kabupaten Bantul sistem pembuang utama dilayani oleh sistem pembuang sungai Opak dan sungai Progo. Secara topografis, Kabupaten Bantul terbagi menjadi daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan utara, daerah perbukitan yang terletak pada bagian timur dan barat serta daerah pantai yang terletak pada bagian selatan. Wilayah Kabupaten Bantul dilewati oleh tiga sungai utama yaitu sungai Opak, Oya, dan Progo. Ketiga sungai ini dimanfaatkan untuk pasokan irigasi serta tambang pasir dan batu.

Wilayah Kabupaten Kulonprogo sistem pembuang utama dilayani oleh sistem pembuang sungai Progo sedangkan wilayah kabupaten Gunung Kidul dilayani oleh sistem pembuang utama Sungai Opak-Oyo. Dari kondisi topografi wilayah yang berbukit dan kemiringan lahan yang sangat besar, maka masalah drainase wilayah bukan menjadi masalah utama. Berbeda dengan kawasan kabupaten Bantul dan kawasan lain di DIY yang ingin membuang limpasan air hujan secepatnya, untuk kawasan Gunung Kidul justru berusaha mempertahankan limpasan air hujan dengan memperbanyak tampungan-tampungan atau tandon. Dimana air ini akan dapat dimanfaatkan pada musim kemarau.

Dari hasil beberapa kajian yang ada, titik fokus terjadinya genangan adalah di daerah Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY). Genangan yang ada di kawasan ini menjadi perhatian karena akan menimbulkan dampak kerugian khususnya di kawasan ekonomi, budaya, pendidikan, dan wisata. Pada daerah permukiman dengan tingkat kepadatan tinggi dan belum memiliki fasilitas saluran drainase atau memiliki saluran drainase yang bercampur dengan saluran limbah menghadapi resiko atau ancaman kesehatan waterborne diseases (penyakit yang disebabkan dari air yang tercemar). Elevasi dari beberapa area berada di bawah elevasi muka air banjir sungai, bahkan beberapa lokasi elevasinya berada di bawah muka air normal sungai. Dengan kondisi tersebut debit limpasan tidak bisa segera dibuang ke sungai, dan jika kondisi ini terjadi, kebocoran pada tanggul sungai akan dapat segera menyebabkan genangan pada areal yang sangat luas. Genangan juga sering terjadi akibat aliran permukaan ("debit run off") pada saat hujan yang tidak bisa segera dibuang atau dialirkan ke sungai atau sistem pembuang yang ada, karena pada saat bersamaan sungai yang ada sudah penuh sehingga tidak mampu menampung tambahan debit dari

aliran permukaan. Berkurangnya luas areal resapan akibat perubahan penggunaan lahan (untuk permukiman, dan lain sebagainya) juga menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya genangan.

Sesuai dengan Master Plan drainase pada tahun 2009 telah diidentifikasi 51 lokasi genangan di KPY yang akan menjadi prioritas lokasi dituntaskan. Capaian penanganan sampai dengan tahun 2012 adalah sebesar 8,43 % dari target sebesar 10 %, hal ini dikarenakan besarnya alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk penanganannya termasuk kebutuhan penanganan diluar Kawasan Perkotaan Yogyakarta.

Pemerintah kini mendorong penerapan pengelolaan sampah dengan sistem 3R (reuse, reduce, dan recycle) pada skala kota. Program pengelolaan sampah terpadu dengan prinsip penggunaan kembali, daur ulang dan pengurangan (reuse, recycle, reduce/3R) ini bermanfaat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dengan prinsip tersebut, jumlah sampah yang dibuang ke TPA tinggal 35 persen sehingga meringankan beban TPA sekaligus memperpanjang masa pemakaiannya.

Undang-undang RI nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif sejak hulu sampai hilir. Pada tingkat perumahan atau kelurahan, dilakukan kegiatan pengurangan sampah melalui program 3R. Dalam pengelolaan menuju zero waste, proses pemilahan dan pengolahan harus dilaksanakan di sumber sampah, baik bersamaan maupun secara berurutan dengan pewadahan sampah. Pengelolaan sampah diawali dari lokasi timbulan sampah atau produsen sampah. Sampah dipisah antara sampah organik dan sampah anorganik, dan ditempatkan pada wadah sampah yang berbeda. Sampah organik untuk diproses menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik biasanya dimanfaatkan untuk didaur ulang maupun dimanfaatkan kembali. Proses selanjutnya baik pengumpulan, pemindahan maupun pengangkutan sampah yang telah terpilah diusahakan jangan tercampur kembali. Hal ini telah direspon oleh Pemerintah DIY dengan menerbitkan Perda Nomer 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Tantangan terbesar adalah bagaimana pemerintah kabupaten/kota dapat mengikuti regulasi tersebut dengan serangkaian rencana tindaknya.

Untuk pengelolaan sampah di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) yang meliputi Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul dilakukan dengan penyediaan sistem pengelolaan sampah terpadu TPA Piyungan. Pada tahun 2012 melalui fasilitasi pendanaan APBN oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan APBD telah dibangun 5 Unit TPST 3R serta penyediaan alat berat di TPA Sanitary Landfill di Kab. Gunungkidul. Jumlah penduduk perkotaan yang terlayani pengelolaan sampah di DIY pada tahun 2009 -2012, disajikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.5 Jumlah dan Persentase Penduduk Perkotaan DIY Terlayani Persampahan Tahun 2009-2012**

No	Kabupaten/ Kota	Tahun 2009		Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012	
		Jumlah Penduduk Perkotaan Terlayani Pengelolaan Sampah		Jumlah Penduduk Perkotaan Terlayani Pengelolaan Sampah		Jumlah Penduduk Perkotaan Terlayani Pengelolaan Sampah		Jumlah Penduduk Perkotaan Terlayani Pengelolaan Sampah	
		Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
1	Yogyakarta	249.678	64,67	270.742	69,67	300.463	77,10	322.616	82,10
2	Sleman	211.929	53,17	233.374	58,17	258.992	64,38	281.433	69,38
3	Bantul	186.432	54,80	204.773	59,80	227.252	66,18	246.458	71,18
4	Gunungkidul	92.401	48,66	102.561	53,66	113.820	59,39	124.431	64,39
5	Kulon Progo	78.229	45,02	87.486	50,02	97.089	55,36	106.741	60,36
	<b>Total Capaian</b>	<b>818.670</b>	<b>55,00</b>	<b>898.936</b>	<b>60,00</b>	<b>997.616</b>	<b>66,40</b>	<b>1.081.679</b>	<b>71,40</b>

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada Tahun 2012, persentase penduduk perkotaan DIY yang terlayani persampahan adalah sejumlah 1.081.679 jiwa dari keseluruhan penduduk perkotaan DIY sejumlah 1.514.957 jiwa, sehingga diperoleh capaian prosentase penduduk perkotaan yang terlayani persampahan adalah sebesar 71,40 % .



Gambar 2.4 Kegiatan Pembangunan 5 Unit TPST 3R oleh Satker PPLP Ditjend Cipta Karya Kementerian PU TA. 2012 di Daerah Istimewa Yogyakarta

Kondisi capaian kumulatif jumlah TPA Sampah yang menggunakan Sistem *Sanitary Landfill* sampai tahun 2012 adalah sebanyak 2 lokasi yang diantaranya dilakukan dengan



Program Pengelolaan Persampahan dan pembangunan TPA *Sanitary landfill* dengan pendanaan bersama-sama antara APBD kabupaten/ kota dan APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum yang berada di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo. Berikut adalah dokumentasi hasil pembangunan TPA *Sanitary Landfill* di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul.



Gambar 2.5

TPA *Sanitary landfill* di Dusun Tawang, Desa Banyuroto, Kec. Nanggulan, Kab. Kulon Progo dengan kapasitas 70 m<sup>3</sup>/hari



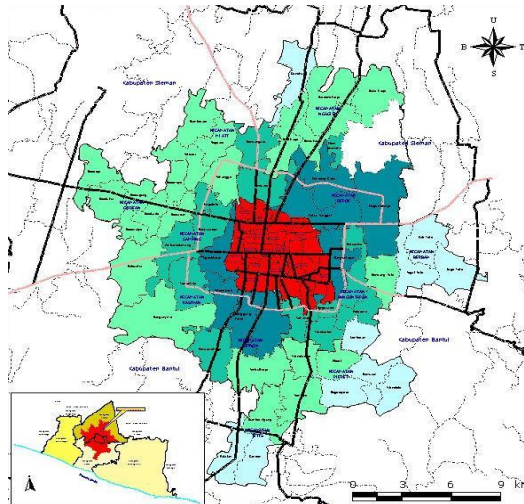
Gambar 2.6

TPA *Sanitary landfill* di Dusun Wukirsari, Desa Baleharjo, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul dengan kapasitas 80 m<sup>3</sup>/hari

### **2.3. Permasalahan Pembangunan Sektor Cipta Karya**

- Permasalahan di bidang cipta karya akan sangat terkait dengan penduduk, baik kepadatan maupun laju pertumbuhannya. Okupansi perumahan berdasarkan distribusi keruangan adalah merupakan poin penting dalam membahas masalah bidang cipta karya karena cipta karya merupakan utilitas bagi perumahan yang telah ada.

- Lokasi perumahan/permukiman di DIY sebagian besar terletak di daerah Kawasan Perkotaan Yogyakarta sebagai konsekuensi dari fungsi kawasan ini sebagai pusat aktifitas ekonomi, pendidikan, dan destinasi wisata. Hal ini tidak akan terlepas dari aspek tata ruang yang ada khususnya di wilayah kabupaten/kota.



- Analisa menunjukkan bahwa koordinasi dan sinergitas lintas sektor pengampu bidang ini masih lemah. Unsur institusi pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat harus bersinergi dengan institusi pekerjaan umum agar hasilnya optimal.
- Sepanjang mengacu pada data-data resmi (BPS), untuk air minum dan air limbah tidak ada masalah terkait dengan pencapaian jumlah layanan. Permasalahan akan terlihat pada kualitas layanan yang tersedia. Data dasar sektor Cipta Karya pada Kawasan Perkotaan yang seringkali dipahami sebagai kawasan APY, sehingga fokus penyelesaian masalah hanya bertumpu pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Kawasan Perkotaan Non APY tidak tersentuh oleh pelayanan Ke CK-an, khususnya untuk persampahan. Perlu pendefinisian kembali, dan penentuan kawasan perkotaan di luar APY serta bagaimana penanganannya
- Penanganan air minum/air limbah/sampah berbasis masyarakat seringkali overestimate di dalam capaian layanannya, sehingga seringkali dianggap cukup untuk kondisi Yogyakarta. Kondisi penanganan keciptakaryaannya harusnya melihat juga dinamika yang ada di dalam kelompok masyarakat tersebut.



## Lampiran I : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum **No. 14/PRT/M/2010**

No	JENIS PELAYANAN DASAR		STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	KETERANGAN
			INDIKATOR	NILAI		
	1		2	3	4	5
III	Air Minum	Cluster Pelayanan	8. Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari		2014	Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum
		Sangat buruk		40%		
		Buruk		50%		
		Sedang		70%		
		Baik		80%		
		Sangat baik		100%		
IV	Penyehatan Lingkungan Permukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan)	Air Limbah Permukiman	9. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.	60%	2014	Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum
			10. Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/ kawasan/kota	5%	2014	Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum
		Pengelolaan sampah	11. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.	20%	2014	Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum
			12. Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.	70%	2014	Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum
		Drainase	13. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	50%	2014	Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum

Fokus pada Evaluasi Kinerja Pengolahan Limbah terpusat belum pernah dievaluasi secara menyeluruh sejak pembangunannya Tahun 1996. Hal ini dikarenakan sistem ini belum pernah menimbulkan “permasalahan”.

Kinerja ini mencakup:

- Jumlah sambungan
- Sistem Penggelontoran
- Sistem Pengolahan

Untuk persoalan persampahan, perlu dilakukan penyusunan Masterplan Pengelolaan Sampah DIY sedangkan dalam penyelesaian drainase perlu memasukkan konsep Mikrodrainage dengan memperhatikan variasi yang ada di DIY. Dari diskusi yang ada, maka analisa permasalahan di bidang cipta karya akan lebih dielaborasi lagi untuk mendapatkan masukan-masukan baik berupa program maupun kegiatan di bidang keciptakarya pada tahun 2014.

### **BAB III**

## **KEBIJAKAN, SASARAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN SEKTOR CIPTA KARYA**

### **3.1. Visi, Misi, dan Tema Pembangunan Daerah**

Visi, Misi dan Program Calon Gubernur DIY Tahun 2012-2017 yang disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD DIY pada tanggal 21 September 2012 dengan tema "Yogyakarta Menyongsong Peradaban Baru" merupakan ide dasar dan pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017. Daerah Istimewa Yogyakarta dalam membangun peradaban barunya yang unggul dengan strategi budaya: membalik paradigma 'among tani' menjadi 'dagang layar', dari pembangunan berbasis daratan ke kemaritiman, dengan menggali, mengkaji dan menguji serta mengembangkan keunggulan lokal (local genius). Konsekuensinya, Laut Selatan bukan lagi ditempatkan sebagai halaman belakang, tetapi justru dijadikan halaman depan. Perubahan paradigmatis ini paralel, bahkan terdorong oleh kebijakan ekonomi nasional dengan ditempatkannya wilayah Kulonprogo dalam program MP3I (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia) berupa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang termasuk dalam 'Koridor Delapan' seluas 3.500-3.700 hektar.

Untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mengembangkan pendidikan yang berkarakter yang didukung dengan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya.
2. Memperkuat perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif disertai peningkatan daya saing pariwisata guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik ke arah katalisator yang mampu mengelola pemerintahan secara efisien, efektif, mampu menggerakkan dan mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri.
4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang.

Tema pembangunan DIY pada tahun 2014 adalah: "Memantapkan perekonomian daerah dan stabilitas sosial politik menuju Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera". Memantapkan perekonomian daerah dimaknai sebagai upaya mendorong kegiatan perekonomian daerah sehingga memiliki basis ekonomi yang bisa diandalkan, tidak mudah goncang (tidak mudah terombang ambing) akibat perubahan global dan perubahan nasional. Peran sektor cipta karya dalam kontribusi memantapkan perekonomian daerah juga dimaknai sebagai upaya membangun infrastruktur dasar untuk mewujudkan SDM yang unggul dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah.

Menuju Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera dimaknai sebagai upaya mengarahkan kepada perwujudan visi jangka menengah daerah Tahun 2013-2017. Pengertian lebih berkarakter sebenarnya berkorelasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berbudaya, karena karakter akan terbentuk melalui budaya. Revitalisasi kawasan budaya merupakan salah satu kegiatan keciptakaryaan yang mendukung pencapaian DIY yang berkarakter dan berbudaya. Berbudaya dimaknai sebagai kondisi dimana budaya lokal mampu menyerap unsur-unsur budaya asing, serta mampu memperkuat budaya lokal, yang kemudian juga mampu menambah daya tahan serta mengembangkan identitas budaya masyarakat setempat dengan kearifan lokal (local wisdom) dan keunggulan lokal (local genius). Melalui program-program pengembangan kawasan baik kawasan agropolitan, minapolitan maupun kawasan strategis cepat tumbuh, sektor cipta karya akan mendukung kepada terwujudnya kondisi DIY yang maju dalam artian makmur secara ekonomi melalui pengembangan pembangunan bidang perekonomian khususnya penyediaan infrastruktur industri, perdagangan, pertanian, dan sektor lainnya. Program-program sanitasi juga akan mendukung pencapaian masyarakat yang maju dalam hal derajat kesehatan baik, harapan hidup tinggi dan kualitas pelayanan sosial baik. Penguatan kelembagaan masyarakat yang mengiringi pembangunan infrastruktur keciptakaryaan diharapkan akan dapat memandirikan masyarakat dimana masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya (self-help), mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya, mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan keciptakaryaan yang telah dilakukan dengan sumberdaya yang dimiliki. Masyarakat diharapkan sudah tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahannya dan dalam upaya meningkatkan kondisi infrastruktur dasarnya.

Peran sektor cipta karya dalam mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut di atas terlihat dalam kontribusinya pada prioritas pembangunan DIY Tahun 2014 di bidang:

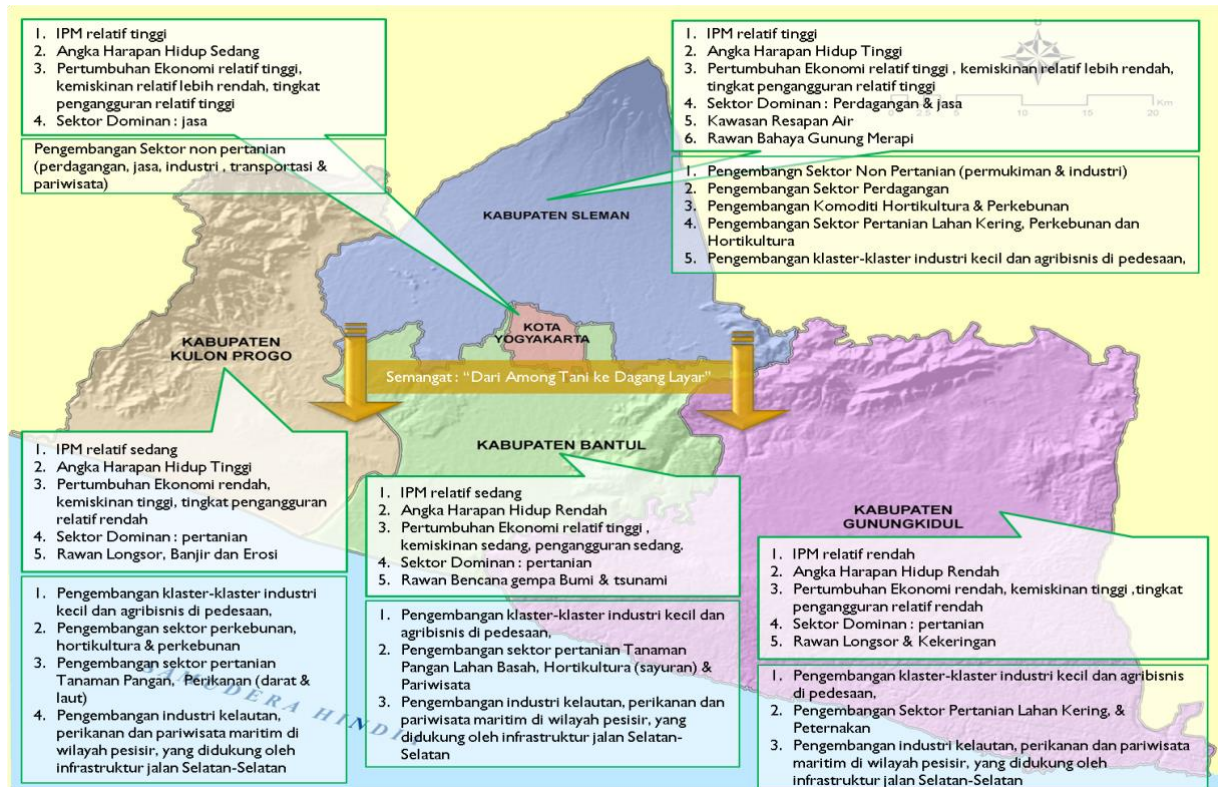
1. Kesehatan;
2. Infrastruktur;
3. Lingkungan hidup dan bencana;

Prioritas pembangunan nasional yang akan mendukung pelaksanaan RKP Tahun 2014 khususnya di sektor cipta karya ada pada 3 prioritas nasional yaitu: (3) Kesehatan; (6) Infrastruktur; (9) Lingkungan Hidup dan Bencana; sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2010-2014.

No	Prioritas	Sasaran	
1	2	3	
3.	Kesehatan	1.	Terwujudnya peningkatan kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat.
		2.	Pengurangan resiko terjadinya penyakit, kecelakaan dan dampak bencana.
6.	Infrastruktur	1.	Terwujudnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas.
		2.	Terwujudnya pengelolaan penyediaan air minum.
		3.	Terwujudnya pengelolaan pelayanan air limbah yang cepat, tepat dan terstruktur.
		4.	Terwujudnya pengelolaan pelayanan persampahan yang cepat dan terpilah.
		5.	Terwujudnya pembangunan dan pengelolaan gedung dan lingkungan yang sesuai dengan perencanaan dan konstruksi.
		6.	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Infrastruktur dan Industri Konstruksi.
		7.	Terciptanya perencanaan tata ruang yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.
9.	Lingkungan hidup dan bencana	1.	Terwujudnya peningkatan kewaspadaan/ketahanan masyarakat terhadap bencana.
		2.	Terwujudnya pembangunan daerah yang lebih berwawasan lingkungan.
		3.	Peningkatan Penanganan dan pengurangan resiko bencana.
		4.	Peningkatan perbaikan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Rencana pembangunan tahun 2014 juga menggunakan pendekatan kewilayahan yang digunakan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah, dengan penanganan secara lintas sektoral pada setiap wilayahnya.

### Arah Pembangunan Kewilayahan DIY



Prioritas dan Sasaran tahun 2014

### 3.2. Kebijakan dan Sasaran Pembangunan Sektor Cipta Karya

Analisa kebijakan pembangunan sektor cipta karya akan sangat terkait dengan isu utama pembangunan wilayah perkotaan yang terfokus pada tekanan populasi terhadap ruang kota (tata guna lahan). Laju urbanisasi yang membawa implikasi kepada pengembangan tata guna lahan, kebijakan dan intervensi pemerintah terhadap tata guna lahan, dan peran serta respon sektor swasta terhadap kebijakan penggunaan lahan (tata ruang kota) merupakan derivasi dari isu utama tersebut. Isu-isu tersebut perlu direspon guna mengupayakan terwujudnya ruang kota yang berkelanjutan yang mampu menciptakan ruang kota yang layak huni dan mampu membangkitkan sekaligus meningkatkan produktivitas penduduknya.

Perkembangan ruang kota yang makin terdesak oleh tekanan penduduk terhadap lahan membutuhkan kebijakan pembangunan wilayah kota yang terarah. Pembangunan



perkotaan diarahkan untuk: mengurangi kesenjangan akses terhadap layanan infrastruktur dasar, utamanya bagi warga miskin kota, melalui penyediaan hunian yang layak berikut sarana dan prasarana dasar

pendukungnya. Penyediaan akses layanan infrastruktur dasar tersebut diharapkan dapat mengurangi kesenjangan di antara warga kota dan mendukung terbukanya kesempatan untuk mengakses kantong-kantong perekonomian kota, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan warga kotanya.

Pembangunan perdesaan mempunyai fungsi sebagai tempat penghidupan yang berkelanjutan (*sustainability*), terutama sebagai cadangan dan sumber daya alam yang ada di pedesaan, mendukung ekonomi nasional dan meredam urbanisasi.

Disamping itu, pembangunan perdesaan bertujuan pula untuk memajukan kawasan perdesaan dan masyarakatnya, mendukung swasembada pangan, meningkatkan produksi bahan pangan, penyediaan prasarana dan sarana dasar kepada masyarakat, penyediaan bahan baku industri, meningkatkan peranserta masyarakat dalam pembangunan perdesaan, dan mengembangkan hubungan kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan yang saling menunjang dan saling menguntungkan.

- **Desa cepat berkembang** adalah desa yang mempunyai akses yang relatif tinggi ke kawasan perkotaan, masyarakatnya mulai heterogen, dan kegiatan ekonominya tidak tergantung kepada sektor pertanian saja tetapi mulai menunjukkan adanya diversifikasi kegiatan ekonomi ke arah non-pertanian.
- **Desa potensial berkembang** adalah desa yang aksesnya ke kawasan perkotaan terbatas, masyarakatnya masih bergantung kepada sektor pertanian atau pertambangan, diversifikasi kegiatan ekonominya masih terbatas, serta penduduknya masih homogen.
- **Desa tertinggal** adalah kawasan perdesaan yang mempunyai keterbatasan sumber daya alam.

Pendekatan pembangunan perdesaan yang terpadu sangat dibutuhkan, antara lain melalui pengelompokan kawasan perdesaan berdasarkan tingkat perkembangannya, yaitu menurut desa cepat berkembang, desa potensial berkembang, dan desa tertinggal. Partisipasi masyarakat secara aktif sangat penting dalam pembangunan infrastruktur di wilayahnya, karena pelayanan

infrastruktur akan lebih akuntabel apabila masyarakat ikut terlibat dalam perencanaan, pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur di daerahnya guna memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun relevan dengan kebutuhan. Pendekatan pembangunan yang berkelanjutan menjadi penting untuk diupayakan terus menerus dalam rangka memenuhi kebutuhan saat ini dengan tetap memperhatikan kebutuhan pada masa yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan keterkaitan aspek-aspek: lingkungan, ekonomi dan sosial sebagai sebuah sistem pembangunan guna mewujudkan kondisi masa depan yang sehat dan sejahtera.

Penyelenggaraan pembangunan sektor cipta karya dilaksanakan berdasarkan kewenangan sesuai dengan PP 38 tahun 2007. Pemerintah secara tegas telah memberikan arahan penyelenggaraan sarana dan prasarana bidang Cipta Karya berdasar kewenangan dan urusan pemerintahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 38

tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peran pemerintah propinsi dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana pada masing-masing bidang Cipta Karya tersebut, dijelaskan berikut ini.

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Pemerintah Provinsi
Air Minum	Pengaturan	Penetapan peraturan daerah provinsi mengenai kebijakan dan strategi lintas kabupaten/kota di wilayahnya dengan mengacu kebijakan nasional.
Air Limbah		
Persampahan		Penetapan peraturan daerah NSPK berdasarkan SPM yang disusun pemerintah.
Drainase		

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Pemerintah Provinsi
Air Minum	Pembinaan	Penyelesaian masalah dan permasalahan yang bersifat lintas kabupaten/kota.
Air Limbah		
Persampahan		Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan di lingkungan wilayah provinsi.
Drainase		

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Pemerintah Provinsi
Air Minum	Pembangunan	Penyusunan rencana induk pengembangan PS lintas kabupaten/kota.
Air Limbah		
Persampahan		Fasilitasi pengembangan PS lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi.
Drainase		Penanganan bencana alam tingkat provinsi

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Pemerintah Provinsi
Air Minum	Pengawasan	Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan PS yang berada di wilayah provinsi.
Air Limbah		
Persampahan		Evaluasi kinerja pelayanan di lingkungan wilayah provinsi.
Drainase		Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.

### 3.3. Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Sektor Cipta Karya

Berdasarkan analisa tentang kondisi umum sektor cipta karya di DIY, permasalahan yang dihadapi, serta kebijakan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaian sasaran tersebut kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah n+1. Program dan kegiatan prioritas sektor cipta karya yang diusulkan adalah sebagai berikut:

No	Sektor	Program	Kegiatan
1	Air Minum	Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum
2	Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Pembangunan Prasarana dan Sarana Persampahan
3	Air Limbah	Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah, Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah, Pengembangan Sistem Sanitasi Berbasis Masyarakat, Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah, Pemantauan Kualitas Air Dan Lingkungan Sistem Jaringan Limbah, Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Limbah
4	Drainase	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong, Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
5	Pengembangan Kawasan	Program Pengembangan Kawasan Perkotaan, Program Pengembangan Kawasan Perdesaan	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Perkotaan, Pembangunan Infrastruktur Perkotaan, Pengembangan Desa Pusat Pertumbuhan, Pembangunan Infrastruktur Pedesaan



## Bidang Air Minum

**Tujuan:** Pembangunan sarana dan prasarana air minum difokuskan pada upaya perluasan cakupan dan peningkatan kualitas pelayanan. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka mempercepat pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs), penurunan sebesar separuh, proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada 2015 .

No.	Sasaran	Indikator	Kebijakan	Program
1	Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih di DIY	Jumlah (prosentase) cakupan pelayanan air minum secara di DIY hingga mencapai 77,38%.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong peningkatan cakupan pelayanan air bersih baik di perkotaan maupun perdesaan.</li> <li>- Memprioritaskan peningkatan pelayanan air minum/bersih perpipaan di perkotaan.</li> <li>- Mengembangkan sistem penyediaan air minum yang terpadu dengan pelayanan sanitasi.</li> <li>- Meningkatkan koordinasi regional (antar pemerintah kota/kabupaten) dalam perencanaan pelayanan air bersih.</li> <li>- Meningkatkan sistem informasi cakupan pelayanan air bersih berikut pemetaan sistem.</li> <li>- Mendorong pelibatan swasta dalam penyelenggaraan air minum.</li> <li>- Mendorong pengembangan dan pemanfaatan teknologi di bidang air minum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan jaringan perpipaan air bersih di perkotaan dan perdesaan.</li> <li>- Pemantauan dan pembinaan perencanaan pelayanan air bersih di tingkat provinsi.</li> <li>- Pemantauan keberlanjutan sistem penyediaan air di perkotaan dan perdesaan.</li> <li>- Penyusunan sistem informasi data cakupan pelayanan air bersih di perkotaan dan perdesaan.</li> <li>- Pengembangan dan pemanfaatan teknologi produksi dan pengelolaan air minum.</li> </ul>
2	Meningkatnya cakupan pelayanan air minum perpipaan khususnya di wilayah perkotaan	Jumlah (prosentase) cakupan pelayanan air minum perpipaan di perkotaan mencapai 60%		
3	Meningkatnya kapasitas produksi infrastruktur air minum	Kapasitas produksi terpasang dan kapasitas produksi tambahan meningkat 5% per tahun (dari kondisi tahun sebelumnya).		
4	Meningkatnya kualitas air minum perkotaan	Sampai dengan tahun 2013 telah memenuhi 95% syarat dalam Kepmen Kesehatan RI. No. 907/Menkes/ VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum.		
5	Meningkatnya keikutsertaan swasta dalam investasi pembangunan infras. air minum di kota dan kabupaten,	Terdapat Kota dan kabupaten yang menginisiasi kerjasama dengan swasta dalam pelayanan air bersih		
6	Meningkatnya kinerja pengelola air minum	Menurunnya prosentase jumlah kehilangan air menjadi 30%		
7	Teraplikasikannya teknologi untuk mendukung kegiatan ekspansi di bidang air bersih secara efektif.	Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan dengan memperhatikan kearifan lokal.		

### Sasaran Sub Bidang Air Limbah

Tujuan: Pembangunan sarana dan prasarana air limbah difokuskan pada upaya perluasan cakupan dan peningkatan kualitas pelayanan. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka mempercepat pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs), penurunan sebesar separuh, proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada 2015 .

No.	Sasaran	Indikator	Kebijakan	Program
1	Meningkatnya cakupan pelayanan sanitasi (limbah cair domestik).	Peningkatan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah termasuk sanitasi di perkotaan dan perdesaan 85%.	- Meningkatkan cakupan pelayanan limbah cair domestik sistem perpipaan di perkotaan.	- Pengembangan pelayanan limbah cair domestik dengan sistem off-site diperkotaan.
2.	Meningkatnya cakupan pelayanan air limbah terpusat ( <i>sewerage system</i> ),	Pelayanan air limbah dengan sewerage system mencapai 15.800 SR.	- Mengembangkan sistem monitoring kinerja pelayanan fasilitas air limbah terbangun.	- Pengembangan pelayanan limbah cair domestik di perdesaan dengan pengembangan metoda eco-sanitation.
3.	Meningkatnya ketersediaan fasilitas IPLT.	Terseainya fasilitas IPLT.	- Mengembangkan sistem informasi data cakupan pelayanan air limbah berikut pemetaan.	- Pemantauan dan pembinaan kinerja pelayanan sanitasi di perkotaan dan perdesaan.
5.	Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan.	Penurunan angka penyakit menular bawaan air sampai dengan 25%	- Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pembangunan penyehatan lingkungan dan permukiman.	- Penyempurnaan sistem informasi data pelayanan sanitasi.
6.	Teraplikasinya teknologi di bidang pengelolaan sanitasi dan limbah permukiman secara efektif.	Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan dengan memperhatikan kearifan lokal.	- Mengembangkan teknologi di bidang sanitasi lingkungan permukiman. - Mengembangkan fasilitas Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) di DIY. - Mengembangkan <i>Community-Based Sewerage System</i> (CBSS) dalam pengolahan limbah domestik.	-

### Sasaran Sub Bidang Persampahan

Tujuan: Pembangunan persampahan difokuskan pada upaya peningkatan jumlah sampah yang terangkut dan serta meningkatnya kinerja pengelolaan tempat pemrosesan akhir (TPA) yang berwawasan lingkungan (*environmental friendly*) di semua kota dan kabupaten.

No.	Sasaran	Indikator	Kebijakan	Program
1	Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan.	Peningkatan cakupan layanan persampahan yang ramah lingkungan di DIY hingga mencapai 57%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas layanan di TPA.</li> <li>- Meningkatkan penerapan metode 3 R di masing-masing daerah.</li> <li>- Mengembangkan sistem monitoring kinerja pelayanan fasilitas persampahan terbangun.</li> <li>- Mengembangkan mekanisme kerjasama dengan swasta yang lebih efektif.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan master plan pelayanan persampahan di DIY.</li> <li>- Pengembangan sarana pendukung dalam upaya pengelolaan sampah dengan penerapan metode 3R (reuse, reduce, recycle) di masing-masing daerah.</li> <li>- Perbaikan metoda pengolahan sampah di TPA menjadi Sanitary Landfill.</li> <li>- Peningkatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan sampah secara terpadu dalam penyediaan lahan TPA regional.</li> <li>- Pengembangan inovasi teknologi pengelolaan sampah industri dan rumah tangga.</li> </ul>
2	Meningkatnya pelayanan TPA sistem regional dengan metoda <i>Sanitary Landfill</i> .	Meningkatnya sarana prasarana pendukung di TPA dalam rangka penggunaan metoda <i>sanitary landfill</i> .		
3.	Teraplikasinya teknologi di bidang pengelolaan sampah secara efektif.	Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan dengan memperhatikan kearifan lokal.		
4.	Pengembangan TPST 3R	Tersedianya TPST 3R sebanyak 2 unit		

### Sasaran Sub Bidang Drainase

Tujuan: Pembangunan drainase dprioritaskan pada upaya meningkatkan fungsi saluran drainase sebagai pematics air hujan dan mengurangi wilayah genangan.

No.	Sasaran	Indikator	Kebijakan	Program
1.	Terwujudnya sistem drainase berwawasan lingkungan.	Jumlah kejadian banjir pada daerah rawan banjir menurun .	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengembangkan drainase berwawasan lingkungan.</li> <li>- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sistem drainase permukiman.</li> <li>- Menyelaraskan sistem drainase dengan master plan RTRW Prop/Kab/Kota dan program pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).</li> <li>- Menyusun mekanisme pembinaan dan pemantauan kinerja saluran drainase di perkotaan dan perdesaan.</li> <li>- Meningkatkan operasi dan pemeliharaan sistem drainase.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengembangkan teknologi berwawasan lingkungan.</li> <li>- Pengembangan sistem drainase di perkotaan</li> <li>- Pemantauan dan pembinaan kinerja pengoperasian dan pemeliharaan sistem drainase di perkotaan dan perdesaan.</li> <li>- Pengembangan sistem informasi data cakupan drainase dan daerah banjir.</li> </ul>
2.	Terwujudnya sistem drainase yang terintegrasi dengan pengelolaan DAS.	Nilai perbandingan debit maksimum dan debit minimum sungai kecil.		
3.	Penurunan luasan dan frekuensi banjir.	Jumlah titik genangan air menurun sampai 39,90%.		

## BAB IV

### KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR CIPTA KARYA

#### 4.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah Istimewa Yogyakarta menggambarkan kemampuan daerah tersebut dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumberdaya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perkembangan kegiatan ekonomi DIY yang dicerminkan dengan PDRB baik yang dinilai dalam harga konstan maupun harga berlaku mengalami kenaikan. Nilai PDRB DIY dengan harga konstan 2000 pada tahun 2011 adalah sebesar Rp22,129 trilyun dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,16% dari tahun sebelumnya, sedangkan proyeksi PDRB tahun 2012 diperkirakan masing-masing mencapai kisaran Rp22,238 trilyun - Rp23,362 trilyun. PDRB DIY diprediksikan mengalami kenaikan terus menerus sampai tahun 2014 dengan kisaran proyeksi PRDB pada 2013 dan 2014 adalah Rp24,444 trilyun-Rp24,600 trilyun dan Rp25,740 trilyun-Rp25,978 trilyun. Sementara itu prediksinya pada tahun 2015 berkisar antara Rp27,130 trilyun sampai Rp27,459 trilyun.

Selama tahun 2011, peranan sektor berturut-turut dari yang tinggi ke rendah setelah sektor perdagangan dan hotel, sektor jasa-jasa, sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan, sektor konstruksi, sektor listrik gas dan air bersih, dan yang terendah adalah sektor penggalian. Sektor Perdagangan, hotel dan restoran mempunyai kontribusi lebih dari seperlima PDRB, sementara itu dua sektor terkecil yaitu listrik, gas dan air bersih serta pertambangan dan penggalian mempunyai kontribusi di bawah satu persen dari PDRB.

**Tabel 4.1. Kontribusi PDRB Sektoral Provinsi DIY Berdasarkan Lapangan Usaha  
(Harga Konstan 2000), 2011 – 2015 (%)**

Lapangan Usaha	2011	2012*	2013*	2014*	2015*
1. Pertanian	17,00	16,23	16,04	15,82	15,54
2. Pertambangan dan Penggalian	0,65	0,68	0,65	0,63	0,62
3. Industri Pengolahan	13,31	13,34	13,37	13,37	13,32
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0,90	0,92	0,91	0,91	0,91

5. Konstruksi	9,75	9,86	9,90	10,02	10,10
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	20,82	21,02	21,08	21,15	21,35
7. Transportasi dan Komunikasi	10,70	10,87	10,99	11,02	11,02
8. Keuangan, Real Estat & Jasa Perusahaan	9,80	9,91	10,01	10,05	10,07
9. Jasa-jasa	17,07	17,17	17,06	17,05	17,07
<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Keterangan: \* adalah angka proyeksi

Sumber: Penyusunan Makro Ekonomi DIY Tahun 2012 – 2018

Pola struktur PDRB DIY pada tahun 2011 diproyeksikan akan terus berlanjut di masa mendatang sampai tahun 2015 mengingat perekonomian DIY masih bertumpu pada jasa pendidikan, pariwisata dan budaya. Kegiatan ekonomi di sektor tersebut menciptakan permintaan di sektor perdagangan, hotel dan restoran yang terus tinggi. Sementara itu, sektor perdagangan DIY pada beberapa tahun mendatang akan didorong kuat oleh perdagangan internasional dengan kegiatan ekspor dan impor karena beberapa hal berikut: a) Proses pemulihan krisis ekonomi global yang terus berlanjut mendorong geliat ekonomi pasar global yang menjadi tujuan ekspor produk-produk DIY; b) Permintaan ekspor yang terus meningkat dan diharapkan mampu mendorong investasi jangka panjang dan; c) Proyeksi kinerja ekonomi nasional untuk satu dasawarsa mendatang berada pada tren meningkat dengan didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tinggi dan pembentukan modal kerja (investasi) pada momentum era golden age angkatan kerja Indonesia.

Pertumbuhan sektor pertanian yang lambat harus menjadi salah satu fokus perhatian khusus di DIY mengingat pangsa tenaga kerja yang bergerak di sektor tersebut masih sangat besar. Pertumbuhan output sektor pertanian yang lambat dan masih tingginya jumlah tenaga kerja pertanian menyebabkan pendapatan per kapita di sektor ini tetap rendah. Rendahnya pendapatan per kapita di sektor ini dapat menjadi penghalang bagi tenaga kerja yang masih produktif dan muda untuk bergerak di sektor pertanian.

Secara makro regional kondisi internal domestik DIY yang mendukung terciptanya suasana optimis dalam proyeksi makro ekonomi Provinsi DIY adalah misi dari seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perbaikan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik melalui penerapan good governance sebagai misi utama seperti yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah-nya. Perpaduan dari kedua faktor eksternal dan internal inilah yang diyakini akan membuat lompatan perbaikan iklim investasi sebagai penopang perekonomian makro Provinsi DIY dalam satu dasawarsa mendatang.

#### 4.2 Pendanaan Pembangunan Sektor Cipta Karya

Alokasi besarnya kebutuhan pendanaan pembangunan sektor cipta karya dalam memenuhi target RPJMD dapat terbagi dari berbagai sumber pendanaan ; APBN, APBD DIY, APBD kabupaten/kota, dan sumber-sumber lain yang berasal dari swasta, hibah, dll. Keterbatasan sumber pendanaan dari APBD DIY dapat terlihat berdasarkan APBD DIY yang digunakan untuk mendanai pembangunan sektor cipta karya pada tahun 2012 dan 2013.

**Tabel 4.2. Pagu APBD DIY tahun 2012-2013 untuk Program-Program Keciaptakaryaan**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	APBD 2012	APBD 2013
		Anggaran	
1.03.1.03.1.16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	2.700.000.000	3.424.916.000
1.03.1.03.1.32	Program Pelayanan Jasa Pengujian	279.732.000	255.000.000
1.03.1.03.1.33	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	331.733.700	260.000.000
1.03.1.03.1.34	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	150.000.000	275.000.000
1.03.1.03.1.35	Program Pengawasan Jasa Konstruksi	150.000.000	450.000.000
1.03.1.03.1.36	Program Pengelolaan Persampahan	5.350.000.000	174.950.000
1.03.1.03.1.37	Program Pengembangan Kawasan Perkotaan	2.088.800.000	2.649.950.000
1.03.1.03.1.38	Program Pengembangan Kawasan Perdesaan	16.750.000.000	19.050.000.000
1.03.1.03.1.41	Program Pengembangan Manajemen Laboratorium	305.843.294	425.000.000
1.03.1.03.1.42	Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum	555.000.000	700.000.000
1.03.1.03.1.44	Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum	1.000.000.000	1.574.270.000
1.03.1.03.1.45	Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah	4.088.655.000	4.253.244.000
1.03.1.03.1.25	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku		2.214.138.240
		<b>33.749.763.994</b>	<b>35.706.468.240</b>

Meskipun terdapat kenaikan pagu pada tahun 2013, namun jika dilihat dari postur pendanaan untuk tiap-tiap program akan terlihat dengan jelas minimnya dukungan APBD DIY bagi pembangunan keciaptakaryaan khususnya untuk sektor sanitasi dan air minum.

Fokus belanja untuk pembangunan sektor cipta karya lebih diarahkan kepada pengembangan infrastruktur perdesaan atau perkotaan. Sekitar 50% belanja terserap pada pemenuhan prasarana dan sarana pembangunan perdesaan/perkotaan, sedangkan pendanaan untuk target-target MDG's yakni sektor sanitasi dan air minum belum terlalu memadai. Dengan kondisi seperti ini, maka sinergitas pendanaan dari berbagai sumber lain (APBN, APBD kabupaten/kota, dll) menjadi penting dalam pemenuhan target indikator MDG's maupun RPJMD.

Berdasarkan KUA-PPAS APBD 2014 yang telah disusun, alokasi pendanaan pembangunan sektor cipta karya mengalami kenaikan yang cukup berarti (lebih dari 10 M) dari tahun sebelumnya seperti terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.3. Pagu APBD DIY tahun 2012-2013 untuk Program-Program Keciptakaryaan**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	KUA PPA 2014
01.03.01.5.2.16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Rp 4.740.000.000
01.03.01.5.2.25	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Rp 1.800.000.000
01.03.01.5.2.36	Program Pengelolaan Persampahan	Rp 1.500.000.000
01.03.01.5.2.37	Program Pengembangan Kawasan Perkotaan	Rp 19.500.000.000
01.03.01.5.2.38	Program Pengembangan Kawasan Perdesaan	Rp 5.000.000.000
01.03.01.5.2.44	Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum	Rp 1.700.000.000
01.03.01.5.2.47	Program Pengembangan Kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi	Rp 4.300.000.000
01.03.01.5.2.45	Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah	Rp 6.000.000.000
01.03.01.5.2.32	Program Pelayanan Jasa Pengujian	Rp 650.000.000
01.03.01.5.2.49	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Rp 1.050.000.000
01.03.01.5.2.50	Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum	Rp 880.000.000
		<b>Rp47.120.000.000</b>

Kenaikan alokasi pendanaan tersebut belum diimbangi dengan perubahan postur anggaran untuk masing-masing program. Program pengembangan kawasan perdesaan dan perkotaan masih mendominasi (lebih dari 50%) anggaran. Pencermatan terhadap output dari masing-masing program akan menjadi penting dalam rangka mendapatkan "output gap" bagi pemenuhan target indikator RPJMD. Rincian kegiatan dan tolok ukur kinerja dari masing-masing program dapat terlihat pada tabel berikut.



**Tabel 4.4. Program, Kegiatan, dan Tolok Ukur Kinerja Sektor Keciaptakaryaan pada KUA PPA 2014**

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja
<b>1</b>	<b>Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku</b>	
	Rehabilitasi Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa	Terlaksananya Rehab. Jaringan irigasi sistem Pompa di Kab. Sleman dan Gunung Kidul
	Penyediaan dan pengelolaan air baku	Tersusunnya Identifikasi sumber-sumber air di DIY
<b>2</b>	<b>Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong</b>	
	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	tersedianya Dokumen Perencanaan Drainase/Gorong-gorong : 1. kaw. gondolayu 2. kaw. wirosaban 3. kaw. sambilegi 4. kaw. lempuyangan 5. kaw. mlati
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Terbangunnya saluran drainase / gorong-gorong di : 1.kawasan Tegalrejo 2.kawasan kotagede 3.kawasan sewon 4.kawasan jalan imogiri barat 5.kawasan godean
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksanya evaluasi pelaksanaan penanganan genangan
<b>3</b>	<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>	
	Pembangunan Prasarana dan Sarana Persampahan	1. tersedianya bangunan TPST 2. tersedianya peralatan persampahan
<b>4</b>	<b>Program Pengembangan Kawasan Perkotaan</b>	
	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Perkotaan	1. Tersusunnya Identifikasi lahan Kawasan Sungai Gajah wong 2. Tersusunnya DED Kawasan Sungai Gajah Wong
	Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	1. Terbangunnya Infrastruktur jalan lingkungan di : - Kec. Gedongtengen -Kec. Mergangsan - Kec. Tegalrejo - Kec. Umbulharjo 2. Terbangunnya Parkir Bertingkat : - Konstruksi - Perencanaan - Pengawasan 3. Terwujudnya Penataan Kawasan
<b>4</b>	<b>Program Pengembangan Kawasan Perdesaan</b>	
	Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Peningkatan aksesibilitas kawasan perdesaan yang difokuskan pada wilayah kecamatan miskin di : -Banguntapan, -Imogiri, -Kasihani, -Sewon, -Gedangsari, -Karangmojo, -Playen, -Ponjong, -Semanu, -Semin, -Kalibawang, -Kokap, -Samigaluh, -Gamping, -Prambanan, -Seyegan
<b>5</b>	<b>Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum</b>	

	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	tersedianya sarana prasarana penyediaan air minum pada 15 kelompok : 1. PAMASKARTA Desa..... 2. PAMASKARTA Desa..... 3. PAMASKARTA Desa..... 4. PAMASKARTA Desa..... Dst...
<b>6</b>	<b>Program Pengembangan Kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi</b>	
	Pengembangan Desa Pusat Pertumbuhan	1. tersedianya infrastruktur kaw minapolitan (kec. temon kab.kulonprogo) 2. tersedianya infrastruktur kaw. minapolitan (kec.sanden kab. bantul) 3. tersedianya infrastruktur Kaw Agropolitan (kec.tanjungsari, kab.gunungkidul) 4. Tersusunnya DED Kawasan Ngobaran
<b>7</b>	<b>Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah</b>	
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	1. Terbangunnya IPLT 2. Terbangunnya Tangki BBM Operasional IPAL 3. Terbangunnya Unit Magnetic Flow Meter Permanen 4. Terbangunnya jaringan lateral
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	1. Pemeliharaan / Pembersihan Siphon Air Limbah 2. Pemeliharaan / Pembersihan Saluran Pembuang (Outlet) 3. Pemeliharaan / Pembersihan Jaringan Saluran Pipa Induk, Lateral dan Glontor 4. Walk Through Jaringan Air Limbah
	Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah	1.O&P Lift Pump 2.O&P Grit Chamber 3.O&P Kolam Aerasi dan Maturasi 4.Pembersihan dan Pembuangan Lumpur Kolam Aerasi 5.O&P Peralatan Instalasi Kelistrikan 6.O&P Instalasi Hydrant 7.O&P Pintu Air di Instalasi Limbah 8.O&P SAP 9.O&P Sludge Drying Bed
	Pemantauan Kualitas Air Dan Lingkungan Sistem Jaringan Limbah	1. Pemantauan dan Daltas Air Limbah Jaringan 2. Pemantauan dan Daltas Air Masuk/Keluar IPAL 3. Pemantauan dan Daltas Udara 4. Pemantauan dan Daltas Air Tanah di Jaringan 5. Pemantauan dan Daltas Biota/Coliform 6. Pemantauan dan Daltas Unsur Dalam Sludge 7. Pemantauan dan Daltas Lumpur Tinja dr Truck Tangki
	Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Limbah	Tersusunnya : 1. Business Plan Pengelolaan Air Limbah 2. Kajian Teknis Mikro Ekonomi Balai IPAL
<b>8</b>	<b>Program Pelayanan Jasa Pengujian</b>	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1.Terlaksananya Bimbingan Teknis terhadap petugas quality control dan petugas laboratorium penguji/pengendalian pekerjaan konstruksi 2.Terlaksananya Bimbingan Teknis terhadap Petugas pengambil sampel air 3.Terlaksananya Bimbingan Teknis terhadap Petugas Lab.Penguji/Pengendali Pekerjaan
	Pelayanan Jasa Laboratorium Pengujian	Terlaksananya Pengujian kualitas mutu air dan kualitas mutu bahan bangunan
	Peningkatan Manajemen Laboratorium Pengujian	1. Dipertahankan Sertifikat SNI ISO 17025 : 2008 Laboratorium Balai PIPBJK secara berkesinambungan dan tercapainya penambahan jumlah parameter terakreditasi 2. Tersedianya alat-alat laboratorium
<b>9</b>	<b>Program Pembinaan Jasa Konstruksi</b>	
	Sosialisasi Dan Diseminasi Peraturan Perundang-	Terlaksananya Sosialisasi dan diseminasi peraturan

	Undangan	perundang-undangan Jasa Konstruksi dan peraturan lainnya yg terkait
	Sistem Database Jasa Konstruksi	Terlaksananya pengelolaan Media Informasi Penyelenggaraan Konstruksi
	Pengaturan Dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi	Terekapitulasinya penerbitan IUJK di Kabupaten/Kota di Pemda DIY
	Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi	Terlaksananya sertifikasi tenaga teknik konstruksi
	Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi	Terlaksananya sertifikasi pengadaan barang dan jasa
	Penyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi Daerah	Tersusunnya rekomendasi pembinaan Jasa Konstruksi kepada pemerintah Daerah
	Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Terseleenggaranya Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
	Pengawasan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terseleenggaranya Pengawasan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
	Pengawasan Terhadap Perizinan Jasa Konstruksi	Terseleenggaranya Pengawasan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
	Pengawasan Terhadap Ketentuan Keteknikan Jasa Konstruksi	Terseleenggaranya Pengawasan Terhadap Ketentuan Keteknikan Jasa Konstruksi
	Pengawasan Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi	Terseleenggaranya Pengawasan Terhadap Keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi
	Pembinaan Konstruksi Berkelanjutan	Pengembangan Materi Pelatihan Konstruksi
<b>10</b>	<b>Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum</b>	
	Pengkajian Potensi Sumber Daya Alam	Publikasi lokasi Quarry di DIY
	Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum	Tersusunnya Media Diseminasi bidang ke-PU-an yaitu : 1..... 2..... 3.....
	Survey Bahan Bangunan Keciaptakaryaan	Terlaksananya Survey dan entry data harga bahan bangunan di 5 kab/kota DIY
	Informasi Teknologi Bidang Pekerjaan Umum	Terlaksananya Peningkatan kapasitas penyelenggaraan konstruksi

Dari hasil analisa arahan kebijakan umum anggaran dan alokasi pendanaan KUA PPA 2014 untuk pembangunan sektor cipta karya didapatkan beberapa catatan penting terkait dengan sinkronisasi dengan sumber pendanaan lain khususnya APBN.

**Tabel 4.5. Arahan Kebijakan Umum Anggaran dan Sinkronisasi Pendanaan dari sumber lain**

No	Sub Sektor	Arahan Kebijakan Umum Anggaran	Sinkronisasi dengan sumber pendanaan lain
<b>1</b>	Air Minum	Dalam rangka meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki akses air minum diarahkan untuk mendanai pengembangan maupun optimalisasi SPAM Desa maupun SPAM IKK. Hal mendasar yang perlu diselesaikan adalah penyusunan data base spasial dan atributnya terkait potensi sumber air yang bisa digunakan dan lokasi masyarakat yang belum berakses air minum.	Keterbatasan anggaran membuat pemerintah DIY hanya mampu menangani optimalisasi dan pengembangan SPAM Desa saja, sedangkan untuk SPAM IKK diharapkan didanai oleh pusat. Usulan ke pusat akan sangat tergantung kepada data dasar yang harus diselesaikan pemerintah DIY terkait potensi sumber air mana saja yang dapat

			digunakan beserta dengan perencanaan teknis sistem jaringannya.
2	Persampahan	Penyediaan infrastruktur dilakukan dengan membangun TPST di KPY sebagai infrastruktur awal yang digunakan untuk menuntaskan pengelolaan sampah sebelum sampai di TPA Piyungan. Analisa kebutuhan jumlah TPST, lokasi potensial, dan perencanaan teknis pembangunan menjadi hal utama yang harus diselesaikan terlebih dahulu.	Untuk penyediaan infrastruktur penunjang di TPA Piyungan, TPA Kulonprogo dan Gunungkidul diharapkan didapat dari sumber pendanaan pusat.
3	Air Limbah	Fokus kebijakan anggaran untuk bidang air limbah diarahkan kepada penyelesaian kewajiban penyediaan pipa lateral pada sistem air limbah terpusat.	Penyelesaian pipa induk dialokasikan kepada pemerintah pusat, sedangkan masalah yang paling butuh perhatian adalah pemasangan pipa servis dan sambungan rumah yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Hal ini menjadi masalah yang harus mendapat perhatian sehingga pemerintah DIY perlu melakukan koordinasi yang intens dengan pemerintah kabupaten/kota.
4	Drainase	Fokus utama penyelesaian masalah drainase adalah penanganan 51 titik lokasi genangan sesuai dengan master plan tahun 2009. Monitoring evaluasi untuk melihat penanganan sampai dengan tahun 2013 harus dilakukan untuk dapat melihat beban penyelesaian sampai 5 tahun kedepan.	Penanganan genangan pada lokasi-lokasi utama yang memerlukan saluran induk drainase diharapkan dialokasikan dari sumber pendanaan pusat.
5	Pengembangan Kawasan	Arahan pengembangan kawasan adalah kepada desa-desa potensi, agropolitan, maupun minapolitan. Sedangkan khusus untuk kawasan budaya dan pariwisata perlu dikedepankan penyusunan SPM khusus terkait dengan pengembangan nya.	Koordinasi dengan kabupaten untuk pembagian peran berikut pendanaan pengembangan kawasan akan menjadi pijakan awal bagi skema pembangunan kawasan di DIY.

#### 4.3. Perubahan APBD tahun 2013

Berdasarkan analisa permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing sub sektor dan program kegiatan yang telah diusulkan melalui APBD 2014, terdapat beberapa catatan yang bisa diusulkan menjadi agenda perubahan APBD 2013.

**Tabel 4.6. Usulan kegiatan melalui APBDP 2013**

No	Sub Sektor	Indikator Target RPJMD	Usulan kegiatan melalui APBD 2013
1	Air Minum	Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki akses air minum. APBD 2014 mendanai pengembangan maupun optimalisasi SPAM Desa sedangkan untuk SPAM IKK akan diusulkan melalui pendanaan pusat.	Hal yang perlu diselesaikan adalah penyusunan data base spasial dan atributnya terkait potensi sumber air yang bisa digunakan dan lokasi masyarakat yang belum berakses air minum.
2	Persampahan	Meningkatkan persentase pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. APBD 2014 diharapkan akan melakukan penyediaan infrastruktur dengan membangun TPST di KPY sebagai infrastruktur awal yang digunakan untuk menuntaskan pengelolaan sampah sebelum sampai di TPA Piyungan.	Analisa kebutuhan tentang berapa jumlah TPST yang diperlukan di KPY, dan koordinasi dengan kabupaten/kota mengenai pembagian peran menjadi hal utama yang perlu diselesaikan.
3	Air Limbah	Meningkatkan jumlah SR sistem terpusat sampai 20.000 SR. APBD 2014 melakukan penyediaan pipa lateral pada sistem air limbah terpusat.	Persoalan yang paling utama dalam pemenuhan target ini adalah pemasangan pipa servis dan sambungan rumah yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Pemerintah kabupaten telah menyampaikan surat kesulitan dalam pemenuhan target SR nya sehingga pemerintah DIY perlu melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mengamankan pencapaian target.
4	Drainase	Penyelesaian penanganan 51 titik lokasi genangan sesuai dengan master plan tahun 2009. APBD 2014 mengalokasikan penyelesaian pada 5 titik dan 5 DED untuk konstruksi n+1	Evaluasi awal mengenai intervensi apa saja dan oleh siapa yang telah dilakukan kepada 51 titik yang ada.

Berdasarkan usulan kegiatan APBDP 2013 yang diajukan oleh Dinas PU-P dan ESDM terlihat dengan jelas bahwa usulan kegiatan masih didasarkan kepada penyelesaian pekerjaan konstruksi yang tertunda atau konstruksi baru dan strategis, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mendesak bagi operasionalisasi kegiatan regular. Hal-hal yang

sifatnya komprehensif bagi pencapaian target atau percepatan belum diakomodir dalam usulan perubahan. Fenomena ini yang harus menjadi catatan untuk dirubah pada waktu-waktu mendatang.

**Tabel 4.6. Usulan APBDP 2013 Dinas PU-P dan ESDM**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Tambah	Keterangan
<b>1.03.1.03.1.37</b>	<b>Program Pengembangan Kawasan Perkotaan</b>		
1.03.1.03.1.37.002	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Perkotaan	450.000.000	1. Perenc. Teknis penataan kawasan S. code (gemawang) 150 jt 2. Identifikasi & inventarisasi penataan kawasan Tegal Panggung 50 jt. Identifikasi & perencanaan penataan kawasan Parkir Ngabean 150 jt
<b>1.03.1.03.1.38</b>	<b>Program Pengembangan Kawasan Perdesaan</b>		
1.03.1.03.1.38.003	Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	50.000.000	Penyusunan DED Joggingtrack di Kawasan Nglanggeran G. Kidul
<b>1.03.1.03.1.44</b>	<b>Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum</b>		
1.03.1.03.1.44.002	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	2.800.000.000	Penyusunan DED Air minum Kartamantul & Penyusunan UKL-UPL Kartamantul + pengadaan tanah utk fasilitasi air minum 2,4 M
<b>1.03.1.03.1.45</b>	<b>Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah</b>		
1.03.1.03.1.45.003	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	2.243.631	Penyesuaian gaji PTT berdasarkan UMK 2013
1.03.1.03.1.45.006	Pemantauan Kualitas Air Limbah dan Lingkungan Sistem Jaringan Limbah	51.400.000	Pembelian reagen untuk BOD Digital